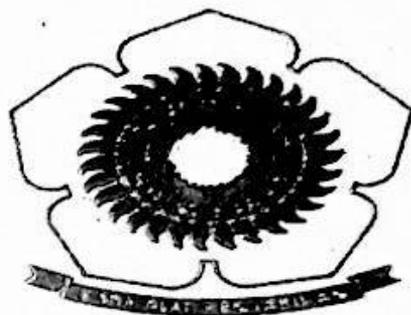


5
657.4807
Sar

**STUDI PERBANDINGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI (STUDI KASUS PADA
PEMKOT PAGARALAM DENGAN PEMKOT PRABUMULIH)**



R. 12414
B. 12698.



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar sarjana
ekonomi jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas sriwijaya**

Oleh :

DEVI CITRA SARI

01003130002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2005

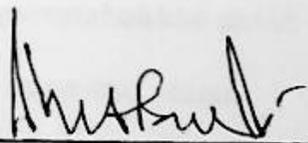
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

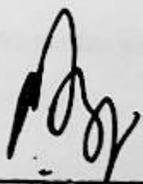
Nama : Devi Citra Sari
NIM : 01003130002
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus pada Pemkot Pagaralam dengan Pemkot Prabumulih).

Panitia Pengawas Skripsi :

Tanggal : 14/04/05 Ketua Panitia :


Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak

Tanggal : Anggota :


Drs. Aspahani, MM, Ak

MOTTO

Masa depan bukan tergantung pada pekerjaan yang dikerjakan melainkan pada orang yang mengerjakannya. (dr. George Crame)

Janganlah mengukur kesuksesan seseorang dari posisi yang telah dicapainya saja. Namun nilailah juga dari berbagai rintangan yang berhasil dilaluinya ketika ia berusaha untuk sukses.

(Booker T, Washington)

Dengan rendah hati, skripsi ini

kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama**
- ❖ Kakak dan Adikku**
- ❖ My Beloved**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, berkat, dan kasih-Nya yang berlimpah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini banyak sekali kelemahan, kekurangan, dan kesalahan baik dalam materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu tulisan kemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan baik material maupun spiritual. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dra. Rina Tjandrakirana MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Burhanuddin, Ak, M.Acc selaku Pembimbing Skripsi I.
5. Bapak Drs. Aspahani, Ak, MM selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi II.
6. Bapak Drs. Tertiaro Wahyudi, Ak, MAFIS selaku dosen penguji tamu.

7. Ibu Dra. Hj. Naisyah Siregar selaku pembimbing akademik.
8. Semua pimpinan staf dan karyawan pada Dipenda dan Badan Keuangan Pemerintah Kota Pagaralam.
9. Semua staf pengajar jurusan Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Staf Administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu secara administrasi sehingga penulis dapat mengikuti ujian komprehensif.
11. Seluruh teman-temanku angkatan 2000 terima kasih untuk persahabatannya selama ini.

Inderalaya, Juni 2005-06-03

Penulis

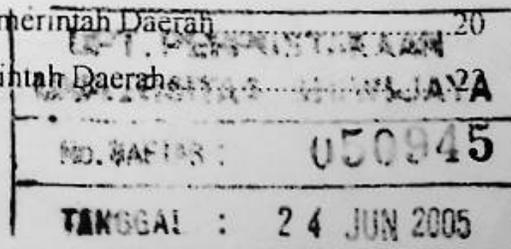
UCAPAN TERIMA KASIH

1. Papa dan Mama tersayang yang telah banyak memberikan dukungan baik material maupun spiritual. Terima kasih atas semua kasih sayang, doa dan dukungannya. Pa, makasih untuk semua ilmu akuntansinya dan Ma makasih atas semua motivasi dan kekuatan yang mama berikan. Kasih sayang dan doa kalian merupakan cahaya yang akan selalu menyinari setiap langkahku.
2. Kakakku Edy dan Adikku Maya yang tersayang. Kak thanks atas dukungan dan motivasinya selama ini dan salam aja buat Yunda (jangan sering-sering berantem ya...Peace) dan Maya yang nakal, jangan keseringan ngambek dan belajarnya lebih giat lagi biar bisa jadi yang the best dan satu lagi makannya agak di rem dikit biar badannya 'gak gembul kayak gentong
3. Om Ifin dan Tante Atin, kapan kasih Ta keponakan yang lucu-lucu?? Jangan kelamaan ya....
4. Para Om + Bulek dan sepupu-sepupu thanks for everything.
5. My Beloved Muhammad Faisal ST, mas adek 'gak tau harus mulai dari mana tapi yang jelas *thanks for all*. Makasih untuk semua cinta, kasih sayang dan bantuannya selama ini. Makasih untuk pinjaman komputer + salonnya (kostku jadi kayak di Twenty One), makasih fotokopi skripsinya, makasih udah jadi teknisi untuk komputerku yang sering nge-*hang*.

6. Temanku Ema (Em, akhirnya... kita bisa jadi SE walaupun dengan berbagai perjuangan. Thanks udah mau nemenin ke rumah pak Burhan, udah kasih semangat saat aku lagi down, and thanks untuk semua ilmunya), Sumira SE (hai es pha kabar sombong amat, mana traktirannya??), tim konsumsi Ryan dan Lia (makasih udah mau jadi tim sukses kompre aku tapi by the way kuenya enak lho...thanks ya. Kalian kapan nyusul ??? makanya kerjain tu skripsi jangan mudik terus. Good Luck ya..kalian pasti bisa). *Finally for all*, thanks untuk persahabatannya selama ini.
7. Teman SMA like Lika, Eta, dan Desi kapan kito ngumpul lagi....
8. Teman-teman seperjuangan kompre Ucok, Adi, Haris, Ema, Duma, Aden, Eko, akhirnya kita tamat jugo es.....
9. Muhajirin's family seperti Om + Tante, K'Oyon + Rika, Belly + Febry, Yanto + Yeni, Heri, K'Sadi, Eka, Riki, Ozy, Nedi, Ivan, Wawan terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Komperta's Family seperti Ibu + Bapak, Windi, Indah, Ratih, Tina makasih udah jadi sahabat selama ini.
11. Semua teman-teman angkatan 2000 seperti evy, Eko model, Dolly, Ina, Rimbun, Hilman, Zronk Q, Sepran, Diana, Asril, Santoso, Saleh selamat berjuang!!!!
12. Seluruh adik-adik tingkat, be the best.....

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Metodologi Penelitian	7
1.5. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Keuangan Daerah	12
2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah	12
2.1.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	13
2.1.3. Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah	14
2.1.4. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	15
2.1.5. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	16
2.1.6. Perbedaan Pokok Keuangan Daerah di Era Prareformasi Dan di Era (Pasca) Reformasi	18
2.1.7. Hubungan Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah Dalam Rerangka Otonomi Daerah	19
2.2. Akuntansi Keuangan Daerah	20
2.2.1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	20
2.2.2. Lingkungan Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20



2.3. Anggaran	25
2.3.1. Pengertian Anggaran	25
2.3.2. Karakteristik Anggaran Sektor Publik	26
2.3.3. Fungsi Anggaran Sektor Publik	26
2.3.4. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik	28
2.4. Konsep Analisis Rasio Keuangan	28
2.4.1. Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio	29
2.5. Pengelolaan Keuangan Daerah	39
2.5.1. Prinsip-Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan APBD	39
2.5.2. Struktur APBD	42
2.5.3. Proses Penyusunan APBD.....	44
2.5.4. Proses Penetapan APBD	47
2.5.5. Perhitungan dan Pertanggungjawaban APBD/Keuangan Daerah	49

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA PAGARALAM DAN PRABUMULIH

3.1. Gambaran Umum Kota Pagaralam	51
3.1.1. Sejarah Umum Pemerintah Kota Pagaralam	51
3.1.2. Letak dan Keadaan Alam	52
3.1.3. Penduduk	54
3.1.4. Fasilitas Umum	54
3.1.5. Potensi	55
3.1.6. Lembaga Penunjang	56
3.1.7. Struktur Organisasi	56
3.1.8. Visi, Misi, dan Rencana Strategis	66
3.1.8.1. Visi.....	66
3.1.8.2. Misi	66
3.1.8.3. Rencana Strategis	67
3.2. Gambaran Umum Kota Prabumulih	68

3.2.1. Sejarah Umum Pemerintah Kota Prabumulih	68
3.2.2. Letak dan Keadaan Alam	69
3.2.3. Penduduk	71
3.2.4. Fasilitas Umum	71
3.2.5. Potensi	73
3.2.6. Lembaga Penunjang	73
3.2.7. Struktur Organisasi	74
3.2.8. Visi, Misi, dan Rencana Strategis	83
3.2.8.1. Visi	83
3.2.8.2. Misi	83
3.2.8.3. Rencana Strategis	84
3.3. Kondisi Keuangan pada APBD Pemkot Pagaralam dan Pekot Prabumulih	86
3.4. Perbandingan Gambaran Umum Kota Pagaralam dan Kota Prabumulih	93
3.4.1. Perbandingan Antara Pemkot Pagaralam dan Prabumulih Ditinjau dari Aspek Umum	93
3.4.2. Perbandingan Antara Pemkot Pagaralam dan Prabumulih Ditinjau dari Aspek Anggaran/Realisasi	96

BAB IV Analisa Perbandingan Rasio Pada APBD Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah Kota Prabumulih

4.1. Analisa Rasio Kemandirian Daerah	99
4.2. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD	103
4.2.1. Analisis Rasio Efektivitas	103
4.2.2. Analisis Rasio Efisiensi	107
4.3. Analisis Rasio Keserasian	110
4.4. Analisa Debt Coverage Ratio (DSCR)	115
4.5. Rasio Pertumbuhan	117

4.6. Analisis Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	125
5.2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pagaram	57
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Prabumulih	75
Tabel 3.1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun Anggaran 2001	87
Tabel 3.2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun Anggaran 2002	88
Tabel 3.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun Anggaran 2003	89
Tabel 3.4. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun Anggaran 2004	90
Tabel 3.5. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun Anggaran 2005	91
Tabel 3.6. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun Anggaran 2006	92
Tabel 3.7. Perbandingan Fasilitas dan Sistem Pendidikan Antara Pemkot Prabumulih dan Prabumulih	93
Tabel 3.8. Perbandingan Fasilitas dan Sistem Pendidikan Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	94
Tabel 3.9. Perbandingan Fasilitas dan Sistem Pendidikan Antara Pemkot Prabumulih dan Prabumulih	95
Tabel 3.10. Perbandingan Fasilitas dan Sistem Pendidikan Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	96
Tabel 3.11. Perbandingan Fasilitas dan Sistem Pendidikan Antara Pemkot Prabumulih dan Prabumulih	97
Tabel 3.12. Perbandingan Fasilitas dan Sistem Pendidikan Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	98
Tabel 3.13. Perbandingan Fasilitas dan Sistem Pendidikan Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	99
Tabel 3.14. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun Anggaran 2001-2003	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Antara Keuangan Daerah di Era Reformasi dan Keuangan Daerah di Era (Pasca) Reformasi	18
Tabel 3.1. Ringkasan APBD Pemkot Pagaram Tahun Anggaran 2001.....	87
Tabel 3.2. Ringkasan APBD Pemkot Pagaram Tahun Anggaran 2002	88
Tabel 3.3 Ringkasan APBD Pemkot Pagaram Tahun Anggaran 2003	89
Tabel 3.4. Ringkasan APBD Pemkot Prabumulih Tahun Anggaran 2001.....	90
Tabel 3.5. Ringkasan APBD Pemkot Prabumulih Tahun Anggaran 2002	91
Tabel 3.6. Ringkasan APBD Pemkot Prabumulih Tahun Anggaran 2003	92
Tabel 3.7. Perbandingan Luas Wilayah dan Luas Penduduk Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	93
Tabel 3.8. Perbandingan Fasilitas di Bidang Pendidikan Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	94
Tabel 3.9. Perbandingan Fasilitas di Bidang Kesehatan Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	94
Tabel 3.10 Perbandingan Fasilitas di Bidang Perdagangan Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	95
Tabel 3.11 Perbandingan Fasilitas Olahraga Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	95
Tabel 3.12 Perbandingan Potensi Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	95
Tabel 3.13 Perbandingan Lembaga Perunjukang Antara Pemkot Pagaram dan Prabumulih	96
Tabel 3.14 Ringkasan Anggaran Pendapatan Pemkot Pagaram dan Prabumulih Tahun Anggaran 2001-2003.....	97

Tabel 3.15 Ringkasan Anggaran Belanja Daerah Pemkot Pagaram dan Prabumulih Tahun Anggaran 2001-2003.....	97
Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2001-2003.....	100
Tabel 4.2. Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2001-2003.....	104
Tabel 4.3. Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2001-2003.....	108
Tabel 4.4. Perhitungan Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2001-2003.....	111
Tabel 4.5. Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Tahun Anggaran 2001-2003.....	111
Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Keserasian Terhadap APBD Tahun Anggaran 2001-2003.....	112
Tabel 4.7. Perhitungan DSCR Tahun Anggaran 2001-2003	115
Tabel 4.8. Rasio Pertumbuhan APBD Pemkot Pagaram dan Prabumulih Tahun Anggaran 2001-2003	118
Tabel 4.9. Kontribusi Sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah	122
Tabel 4.10 Perhitungan Kontribusi Sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001-2003.....	122

**STUDI PERBANDINGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI (STUDI KASUS PADA
PEMKOT PAGARALAM DENGAN PEMKOT PRABUMULIH)**



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar sarjana
ekonomi jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas sriwijaya**

Oleh :

DEVI CITRA SARI

01003130002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa terhadap tingkat kemiskinan. Namun di sisi lain, krisis tersebut telah memberi berkah tersembunyi terhadap upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance* dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Reformasi ini juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma di berbagai bidang kehidupan.

Menindaklanjuti dari reformasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang di dalamnya menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Implikasi kedua undang-undang tersebut terhadap sistem pemerintahan adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

Konsep Otonomi Daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah lebih jauh dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Selain itu dijabarkan pula melalui PP Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dari ketiga PP tersebut secara asas pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, sebagai salah satu wujud dari otonomi suatu daerah.

Dengan hembusan reformasi yang masih berlangsung, tuntutan pemberian otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah menjadi semakin kuat. Tuntutan itu menyangkut pula tuntutan terhadap perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih rasional, proporsional dan nyata. Demikian pula tuntutan terhadap pemerintah yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintah yang bersih, jujur, terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabel) terhadap masyarakat. Dengan demikian, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil saja belum cukup, tetapi masih memerlukan pengelolaan atas keuangan daerah, baik yang berasal

dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendiri. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2002 : 24). APBD yang dipresentasikan di DPRD dan di masyarakat sesuai dengan program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dan bagaimana program-program itu dibiayai.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi dan dana desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan dana desentralisasi adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk

menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan keuangan pada APBD. Analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka skripsi ini diberi judul **"Studi Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus Pada Pemkot Pagaram dengan Pemkot Prabumulih)"**.

1.2. Perumusan Masalah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2002 : 127).

Dari uraian di atas permasalahan yang akan dibahas adalah **“Apakah terdapat perbedaan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah antara Pemkot Pagaralam dengan Pemkot Prabumulih dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah antara Pemkot Pagaralam dengan Pemkot Prabumulih”**.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada judul dan permasalahan dari skripsi ini, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Menilai kemandirian keuangan Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah Kota Prabumulih dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah Kota Prabumulih dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Kota Pagaram dan Pemerintah Kota Prabumulih dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah Kota Pagaram dan pendapatan daerah Kota Prabumulih.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pagaram dan Pemerintah Kota Prabumulih selama beberapa periode.
6. Membandingkan hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Kota Pagaram dan Pemerintah Kota Prabumulih untuk mengetahui kinerja keuangan kedua daerah mana yang lebih baik atau berhasil.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat seperti :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan penulis melalui perbandingan antara pengetahuan yang diperoleh penulis selama di bangku kuliah dengan realita yang ada di masyarakat.
2. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk keadaan yang memenuhi kriteria yang sama dan memberikan pemikiran baru bagi penulis lainnya.
3. Memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu pihak Badan Keuangan daerah Kota Pagaram dan Kota Prabumulih.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam skripsi ini ruang lingkup permasalahan dibatasi hanya pada pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap APBD Pemerintah Kota Pagaram dan Pemerintah Kota Prabumulih tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2003.

1.4.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Data tersebut diatas dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

a. Interview atau wawancara

Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan membaca catatan atau laporan historis, literatur, sumber ilmu pengetahuan yang relevan yang ada kaitannya dengan kondisi yang dibahas.

1.4.4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya digunakan dua alat analisis, yaitu :

1. Analisis Kuantitatif

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan) maupun keuangan. Penulis menggunakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pagaram dan APBD Pemerintah Kota Prabumulih tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2003.

Rasio-rasio yang digunakan antara lain :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

6. Mengukur Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah

$$\text{Kontribusi Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Dana Perimbangan} = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pinjaman Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pinjaman Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Lain-lain Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Lain-lain Pendapatan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Analisis Kualitatif

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang bersifat umum yang dijadikan kerangka berpikir dibandingkan dengan fakta yang sesungguhnya dihadapi. Dengan cara kualitatif ini, penulis akan mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh kemudian akan ditarik kesimpulan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk keteraturan dalam penulisan dan agar lebih mudah mengetahui isi dari skripsi ini, maka pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan apa yang menjadi latar belakang atas dipilihnya judul skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang konsep keuangan daerah, karakteristik keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, konsep anggaran, karakteristik anggaran sektor publik, penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, pengelolaan keuangan daerah

(APBD), prinsip-prinsip penyusunan dan bentuk APBD, struktur APBD, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA PAGARALAM DAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Dalam bab ini dijabarkan mengenai sejarah umum Kota Pagaralam dan Prabumulih, struktur organisasi, visi, misi, kondisi keuangan pada APBD Kota Pagaralam dan Prabumulih.

BAB IV ANALISIS RASIO PADA APBD PEMERINTAH KOTA PAGARALAM DAN APBD PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Pada bab ini penulis akan menjabarkan analisis rasio pada APBD Pemkot Pagaralam dan APBD Pemkot Prabumulih sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dan menghubungkannya dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil pengolahan dan penganalisaan data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Akhirnya sebagai masukan, penulis juga mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2001
- , *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Departemen Keuangan RI, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah*, Penerbit Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Fitriah, *Analisa Perbandingan Rasio Keuangan Pada APBD Pemkot Pangkalpinang dan Palembang sebagai Tolak Ukur Dalam Menilai Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Membiayai Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Skripsi Akuntansi, 2004.
- Halim, Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Penerbit (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- , *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Haryami, Nevi, *Studi Perbandingan Kinerja Pemerintah Kota Prabumulih dalam Meningkatkan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*, Skripsi Akuntansi, 2004.
- Kuntadi, Cris, *Akuntansi Sektor Publik dan Karakteristik Khusus Akuntansi Pemerintahan*, Makalah Akuntansi Keuangan Daerah, Pelatihan dan Pengenalan Akuntansi Keuangan Daerah, 2003.
- , *Modul Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)*, IAI Cabang Sumsel Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Palembang, 2003.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Muchlis, dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2002.

Pemerintah Kota Pagaram, *Monografi Kota Pagaram*, 2004.

Sartono, Agus, *Ringkasan Teori Manajemen Keuangan*, Penerbit BPFE-UGM, Yogyakarta, 2001.

Wardianto, Sugeng, *Pelaporan Keuangan Pemerintah : Studi Teoritikal Pengaruh UU No.22/1999 dan No. 25/1999 Terhadap Perlakuan Akuntansi Sektor Publik*, Skripsi Akuntansi, 2002.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Seri Keuangan Publik, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, Jakarta, 2002.